

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Laatif dan Hasbi Ali 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinaar Grafika.
- Ahsin Thohari. 2016. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat dengan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Dasril Rajab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Gede Pantja Astawa, dan Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, dan M. Aly Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan I*. Kanisius.
- Moh Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mukhlis Taib. 2017. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia* . Bandung: PT. Refika Aditama.

Ni'matul Huda. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara "Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan"*. FH UII Press. Yogyakarta.

Ni'matul Huda, R. Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Media.

Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Yuliandri. 2016 *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Rajawali Pers.

## **B. UNDANG-UNDANG**

[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah](#)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa](#).

## **C. KARYA ILMIAH**

Dian Agung Wicaksana. Maret 2013. *Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1.

Jorawati Simarmata Dan Damai Magdalena, *Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait*, Jurnal Hukum, 2015.

Retno Saraswati. April-Juni 2009. *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Media Hukum, Vol. IX, No. 2.

Sopiani, dan Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum

Tjondro Tirtamulia, *Konstruksi Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Majelis, Edisi 02, Februari 2019

#### **D. WEBSITE**

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diunduh pada hari Senin, 04 Mei 2020.

<https://www.jentera.ac.id/peraturan-desa-dalam-hierarki-perundang-undangan-di-indonesia>, diunduh tanggal 24 Mei 2020.

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9271>, diunduh tanggal 3 Juni 2020.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kedudukan+peraturan+desa&btnG](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kedudukan+peraturan+desa&btnG), diunduh tanggal 14 Juli 2020.

<https://repository.uin-suska.ac.id/4081/3/BAB%20II.pdf>, di unduh pada hari Kamis, 4 Februari 2021.

